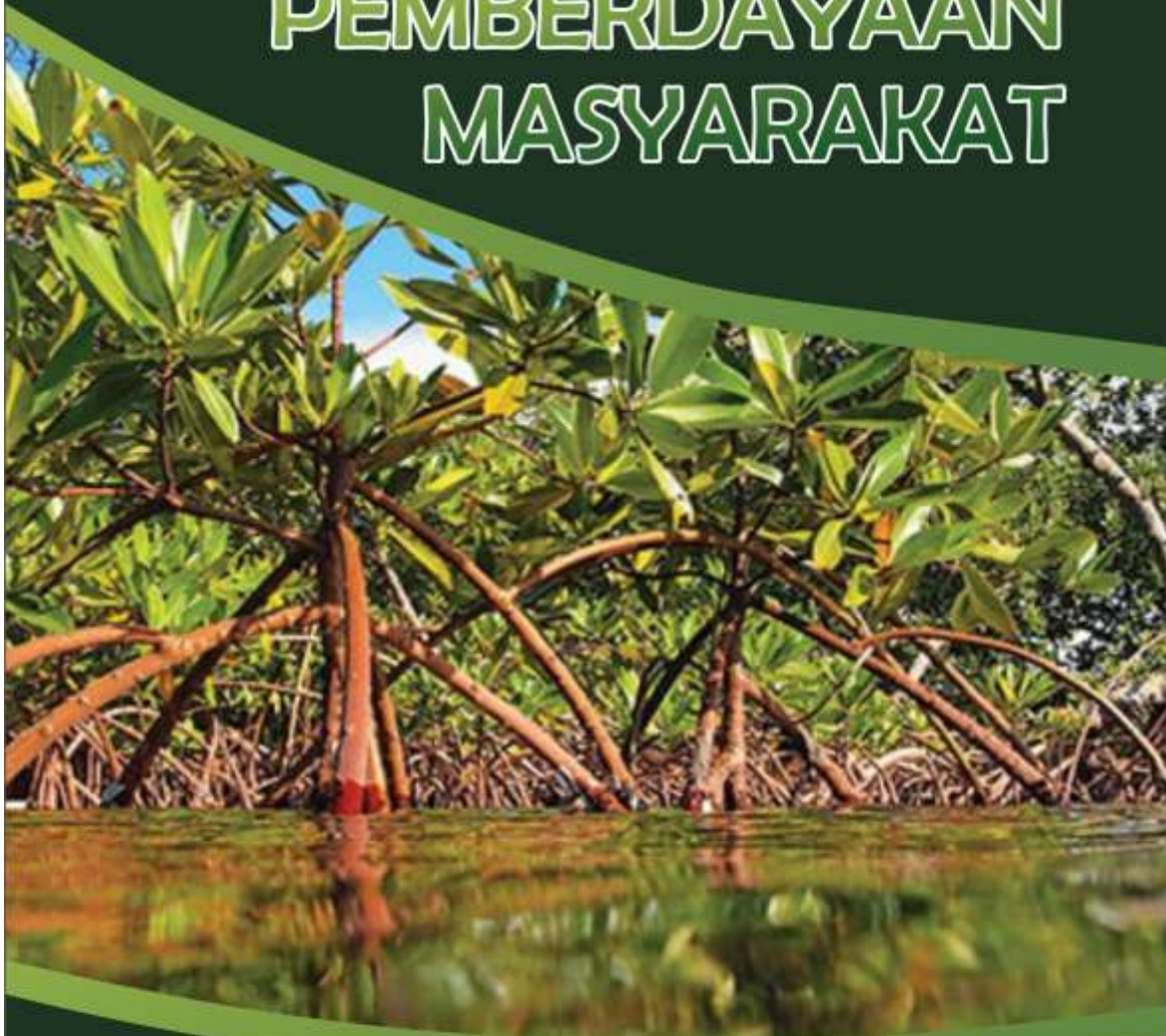




Pengelolaan Mangrove Berbasis
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT



Uswatun Hasanah, SE. M.Si
Dr. Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP
Dr. Rahmad Sembiring, SE., M.SP

PENGELOLAAN MANGROVE BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uswatun Hasanah, SE. M.Si
Dr. Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP
Dr. Rahmad Sembiring, SE., M.SP



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGELOLAAN MANGROVE BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penulis:

Uswatun Hasanah, SE. M.Si
Dr. Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP
Dr. Rahmad Sembiring, SE., M.SP

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

v, 37 , Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-8070-11-4

Cetakan Pertama:

November 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)



KATA PENGANTAR

Pesisir memiliki peranan sangat penting bagi berbagai organisme yang berada di sekitarnya. Kawasan pesisir memiliki beberapa ekosistem vital seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem hutan mangrove. Ekosistem mangrove secara ekologis memiliki produktivitas yang tinggi untuk mendukung lingkungan sekitar. Tingginya produktivitas ekosistem mangrove disebabkan oleh produksi serasah yang dihasilkan dari vegetasi mangrove

Mangrove ternyata memiliki manfaat yang dapat bernilai ekonomi salah satunya adalah buah pida yang dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi permen dan sirup mangrove

Dalam buku ini dibahas mengenai pengelolaan mangrove berbasis pemberdayaan masyarakat, dan perhitungan nilai ekonomi dari pemanfaatan mangrove yakni sirup dan permen jelly mangrove

Penulis berharap semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui mengenai pemanfaatan mangrove yang bernilai ekonomi

Jakarta, 2022

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
CHAPTER 1	
MASALAH KEMISKINANDI DAERAH PESISIR	1
Kemiskinan.....	1
Perspektif Kemiskinan Di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara	2
Kebijakan Pemerintah Mengenai Kemiskinan	5
CHAPTER 2	
KONDISI DAN PERKEMBANGANMANGROVE	6
Mangrove.....	6
Jenis Mangrove.....	7
Perkembangan Mangrove Di Indonesia	9
CHAPTER 3	
MANFAAT MANGROVE.....	12
Manfaat.....	12
CHAPTER 4	
PENGELOLAAN MANGROVE BERNILAI JUAL EKONOMI.....	16
Ekosistem Mangrove	16
Potensi Buah Pidada	16
Pembuatan Sirup dan Permen Jelly Mangrove.....	19
Alat, Bahan dan Cara Pembuatan Sirup	20
CHAPTER 5	
PENGELOLAAN MANGROVE BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UMKM	22
Pola Kemitraan Pengelolaan Mangrove Melalui UMKM	22
Program Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Mangrove Melalui UMKM	31
Daftar Pustaka	32
Tentang Penulis	35



MASALAH KEMISKINAN DI DAERAH PESISIR

KEMISKINAN

Masyarakat pesisir pantai di Sumatera Utara merupakan golongan masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini disebabkan karena Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai gugus pantai yang cukup luas. Dimulai dari pesisir timur Sumatera utara

Kemiskinan tersebut di beberapa Kabupaten Sumatera Utara diantaranya adalah Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asaha Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu. Selanjutnya pesisir barat Sumatera Utara yang terdiri atas Kabupaten Tapanuli tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Keadaan demikian, dengan jumlah masyarakat yang mendiami daerah pesisir tersebut yang cukup besar menjadi suatu hal yang ironi karena ternyata dengan daerah tersebut menjadi kantung kemiskinan di Sumatera Utara.

Adalah Program pengentasan kemiskinan yang merupakan suatu program yang sudah teramat sering kita dengar, namun kenyataannya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dengan “ikhlas hati” ini ternyata belum menemui sasaran yaitu penurunan jumlah masyarakat miskin.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini ternyata jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin sejauh ini belum mengalami penurunan, bahkan dengan situasi ekonomi terkini di duga populasi masyarakat miskin cenderung mengalami peningkatan. Melihat kenyataan di lapangan, populasi masyarakat miskin terkonsentrasi pada daerah pesisir yang notabene berproposisi sebagai

nelayan.

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi di daerah pesisir:

1. Isu pengelolaan wilayah pesisir
2. Musim Paceklik
3. Tidak adanya kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan nelayan saat tidak melaut.
4. Cenderung boros dan tidak adanya tradisi menabung Masih tingginya aktifitas tengkulak di kehidupan Nelayan
5. Seringnya bantuan salah sasaran
6. Permasalahan Pungli.

PERSPEKTIF KEMISKINAN DI INDONESIA DAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dibanding negara sedang berkembang dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional, tidak terkecuali

Negara Indonesia.

Beberapa penyebab kemiskinan diantaranya :

- Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.
- Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
- Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar
- Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
- Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah.

Pada 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019.



Gambar 1. Tingkat kemiskinan nasional 2014-2021(% populasi)

Jika dilihat berdasarkan jumlah orang miskin, sejak September 2019 (kemiskinan terendah yang pernah dicapai Indonesia), jumlah orang miskin meningkat sebesar 1,12 juta individu dengan peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan sebesar 1 juta dan pedesaan sebesar 120 ribu orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara, persentase penduduk miskin tercatat 9,01 persen pada Maret 2021. Sedangkan pada September 2021 menjadi 8,49 persen. Sehingga penurunannya mencapai 0,52 poin. Dengan demikian, angka kemiskinan di Sumatra Utara setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 8,68 persen pada September 2021 lalu. Sedangkan di daerah pedesaan sebesar 8,26 persen.

Untuk daerah perkotaan, persentase penduduk miskin tercatat mengalami penurunan sebesar 0,47 poin jika dibandingkan Maret 2021. Sedangkan daerah pedesaan berkurang sebesar 0,58 poin.

Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp537.310,00 per kapita per bulan. Jumlah ini terdiri atas komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp404.860,00 atau 75,35 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp132.451,00 atau 24,65 persen. Pada periode Maret 2021 hingga September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan. Sebaliknya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sedikit meningkat. P1 turun dari 1,522 pada Maret 2021 menjadi 1,450 pada September 2021. Sedangkan P2 naik dari 0,376 menjadi 0,382. Berdasar catatan BPS, terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatra Utara pada periode Maret-September 2021.

Faktor pertama adalah pandemi Covid-19 yang berkelanjutan. Hal ini sangat berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk, sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. Faktor kedua adalah pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara. Perkonomian Sumatra

Utara Triwulan III 2020 terhadap Triwulan IV 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,67 persen (yoy). Angka ini jauh meningkat dibanding capaian Triwulan III 2020 yang pertumbuhannya terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).

Faktor ketiga adalah inflasi. Selama periode Maret- September 2021, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,82 persen. Sedangkan faktor yang terakhir adalah catatan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 3,26 persen (yoy). Di sisi lain, Sumatra Utara mengalami inflasi sebesar 1,03 persen pada Januari 2022. Perhitungan ini dilakukan terhadap lima kota Indeks Harga Konsumen

(IHK). Yakni Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar, Kota Padang Sidempuan dan Kota Gunung Sitoli.

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI KEMISKINAN

Pemerintah bisa melakukannya cara melakukan program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bantuan Pendidikan membutuhkan informasi tentang siapa dan dimana penduduk miskin itu berada (by name dan by address). Adapun lima langkah untuk menganggulangi kemiskinan yang bisa dilakukan meliputi :

1. Update Data Penduduk.
2. Integrasi Penyaluran Bansos.
3. Subsidi *Administered Prices*.
4. Insentif Dibiidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
5. Pengelolaan APBN Secara Cermat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriany Dewi, 2015. Pengembangan Model Pendekatan Partisipatif Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Medan Untuk Memperbaiki Taraf Hidup. Universitas Negeri Padang: Seminar nasional ekonomi manajemen dan akuntansi (snema) fakultas ekonomi ISBN: 978-602- 17129-5-5.
- Ambar,TeguhSulistiyanı.2004.KemitraandanModel-Model Pemberdayaan.Yogyakarta:Gava Media
- Afriyanto, A. A., & Rahmayuni. (2016). Pengaruh penambahan karaginan terhadap mutu permen jelly dari buah pedada (*Sonneratia caseolaris*). Jom Faperta, 3(2), 212–214.
- Bengen, D G. 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya. Cetakan Kedua. Bogor: Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor
- Binawati,Diah Karunia.dkk.2015. Konservasi Hutan Mangrove Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kawasan Pesisir Di Pulau Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur. Prosiding Seminar Nasional “Research Month”. Hal. 311-319. diakses Minggu 08 November 2020.
- Departemen Agribisnis FEM IPB, 2002. Teknik Pemberdayaan Masyarakat Secara Partisipatif. Bogor: Pelatihan Program Pengembangan Desa Binaan.
- Dahuri, R. 1996. Panduan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Dahuri. 2003. Keanekaragaman Hayati: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Firdaus, Y. 2011. Peranan biaya promosi dalam meningkatkan volume penjualan. Studi kasus pada salah satu perusahaan pembiayaan di Palembang. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (1)2: 143-

152.

- Koentjaraningrat. 1980. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. PT Gramedia. Jakarta.
- Kusmana, C, dkk. (2003). *Teknik Rehabilitasi Mangrove*. Bogor: Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Nurhalimah, 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Sicanang Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan*. Diakses tanggal 20 April 2021. Pada link (<http://repositori.usu.ac.id/hasil-skripsi-manajemen-kehutanan>)
- Nuddin Harahap, Graziano R.2010. Analisis Indikator utama pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat di desa Curahsawo kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Sosek KP* Vol.6 No.1 Tahun 2011
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
- Rajis, D., & Leksono, T. (2017). Pemanfaatan buah mangrove pedada (*Sonneratia caseolaris*) sebagai pembuatan sirup terhadap penerimaan konsumen. 22(1), 51–60.
- Syaparuddin, D. 2013. *Kajian Pembuatan Sirup Buah Pidada Merah (Sonneratia Caseolaris)*. Tugas Akhir. Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh.
- Sabana, C. 2014. *Kajian Pengembangan Produk Makanan Olahan Mangrove*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (14)1: 40-4
- Syukur Djazuli, Aipassa dan Arifin. 2007. Analisis Kebijakan Pelibatan Masyarakat dalam mendukung Pengelolaan Hutan Mangrove di Kota Bontang. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Vol. 14. N0. 2 Desember 2007.
- Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2002
- Wahyukinasi, MH. 2013. *Skripsi. Analisis Kelayakan Usaha Industri Rumah Tangga Berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu dari Ekosistem*

Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur. Fakultas Pertanian Universitas
Lampung

TENTANG PENULIS



Uswatun Hasanah, SE., M.Si

Penulis lahir di tanah melayu Medan, 14 Mei 1991. Menyelesaikan pendidikan sarjana tahun 2013 dan pasca sarjana 2016 Di Universitas Sumatera Utara. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan S3 Di Institut Pertanian Bogor mengambil konsentrasi Ekonomi Regional dan Pemangunan. Sejak tahun 2013 penulis aktif dan bekerja sebagai konsultan perencanaan kota di berbagai daerah Di Provinsi Sumatera Utara, penulis sering dilibatkan menjadi tenaga ahli di berbagai dinas baik provinsi/kabupaten maupun kota baik RTRW, RDTR, RTBL maupun AMDAL dan studi kelayakan. Pada tahun 2018 penulis menjadi staf pengajar pada program studi Ekonomi Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sekaligus menjadi tenaga ahli rektor hingga sekarang. Penulis terlibat langsung sebagai tenaga ahli bidang ekonomi untuk pengembangan wilayah IKN di Buluminung Kalimantan Timur dengan BAPPENAS. Sampai saat ini penulis juga sering menjadi narasumber tetap di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Gender.



DR. Annisa Ilmi Faried, S.Sos., M.SP

Telah menyelesaikan Studi S3 Di Universitas Sumatera Utara. Bekerja menjadi staf pengajar pada Fakultas Sosial Sains Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan dari tahun 2012 sampai sekarang. Sebagai Staf Tenaga Ahli di BALITBANG Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sampai sekarang. Aktif memasukkan jurnal nasional maupun internasional. Sudah mengeluarkan berbagai buku dengan judul Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia, Perekonomian Indonesia : Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan, Ekonomi Pembangunan : Teori-Teori Dasar Ekonomi, Sosiologi Ekonomi. Saya juga menulis beberapa buku kolaborasi dengan beberapa dosen di berbagai universitas yaitu Kewirausahaan Dan UMKM, Teaching From Home Dari Belajar Merdeka Menuju Merdeka Belajar, Pandemi Covid 19 : Persoalan dan Refleksi di Indonesia, Belajar Dari Covid-19 Perspektif Ekonomi & Kesehatan, Kita Menulis : Merdeka Menulis, Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan, Ekonomi Sumber Daya Alam, Ekonomi Pembangunan, Pengantar Ilmu Ekonomi, Pembangunan Dan Perubahan Sosial, Dasar-Dasar Ilmu Sosial, Merdeka Belajar Merdeka Belajar, Literasi Keuangan Masyarakat Studi Kasus Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Semua buku sudah memiliki ISBN, E-ISBN dan HKI.



DR. Rahmad Sembiring, S.E., M.SP

Telah menyelesaikan studi S3 di Universitas Sumatera Utara, Dan dari tahun 2012 sampai sekarang aktif pengajar pada Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan dan juga 2012 – aktif sebagai staf Assosiated Asisten Director Di Lembaga Keuangan Internasional Inggris. Dan pada tahun 2018 mendapat kepercayaan menjadi Staf Ahli

bidang kependudukan dan kebudayaan di Lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Buku yang sudah Ber ISBN dan HKI Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan, ekonomi pembangunan (permasalahan negara sedang berkembang), Ekonomi Pembangunan Teori-Teori Dasar Ekonomi, MONOGRAF, kesejahteraan masyarakat pesisir berbasis budaya sosial ekonomi studi kasus Desa Pahlwan Batubara, Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia.

Masyarakat pesisir pantai di Sumatera Utara merupakan golongan masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini disebabkan karena Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai gugus pantai yang cukup luas. Dimulai dari pesisir timur Sumatra utara, namun sayangnya pesisir Di Provinsi Sumatera Utara identik dengan garis kemiskinan. Namun mengenai kemiskinan ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara mengelola SDA yang ada di pesisir

Perlu diketahui bahwa pesisir memiliki peranan sangat penting bagi berbagai organisme yang berada di sekitarnya. Kawasan pesisir memiliki beberapa ekosistem vital seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan ekosistem hutan mangrove. Ekosistem mangrove secara ekologis memiliki produktivitas yang tinggi untuk mendukung lingkungan sekitar. Pemanfaatan pesisir yang dapat dikelola dan dapat menghasilkan nilai jual diantaranya adalah mangrove. Tingginya produktivitas ekosistem mangrove disebabkan oleh produksi serasah yang dihasilkan dari vegetasi mangrove dianggap dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir yang mampu mengelolanya dengan baik.

Salah satu dari beberapa pemanfaatan mangrove yang dapat bernilai ekonomi adalah pemanfaatan buah pidada mangrove yang dapat diolah menjadi permen dan sirup mangrove. Buah pidada mengandung vitamin A, B1, B dan C yang berperan dalam metabolisme tubuh, terutama produksi energi dan sintesis protein. Buah pidada berbentuk bulat, ujung bertangkai, dan bagian dasarnya terbungkus kelopak bunga. Buah ini berwarna hijau dan mempunyai aroma yang sedap, rasa asam, tidak beracun dan dapat langsung dimakan. Untuk memanfaatkan kandungan gizinya, buah pidada dapat diolah menjadi produk olahan pangan yang disukai masyarakat dan tahan lama, serta diproses secara sederhana.

Dalam buku ini dibahas mengenai pengelolaan mangrove berbasis pemberdayaan masyarakat, dan perhitungan nilai ekonomi dari pemanfaatan mangrove yakni sirup dan permen jelly mangrove.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-8070-11-4 (PDF)



9 786238

070114